

ISLAM PASCA ORDE BARU

Jungjungan Simorangkir*

Abstrak : *Pembaharuan Islam yang digelorkan Nurcholis Madjid, yang lebih banyak mengutamakan pada pendekatan inklusivitas dalam masyarakat Indonesia yang mejemuk ternyata dapat melestarikan komunikasi dengan golongan lain khususnya yang memerintah. Jadi kekuasaan orde Baru mampu bertahan selama tiga dekade, tahun 1998 orde baru tumbang oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, salah satu kebijakan pemerintah pasca Soeharto dalam melakukan penataan perangkat keras yaitu dengan menata kembali sistem kepartaian di Indonesia pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie membebaskan pendirian partai politik selain tiga partai politik warisan Orde baru.*

Kata Kunci : *Umat Islam, Partai Politik dan Orde Baru*

Pendahuluan

Pasca jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, gegap gempita mewarnai euphoria kebebasan dan rasa keadilan. Indonesia memasuki babak baru demokrasi, sangat banyak yang harus dibenahi dalam masa transisi. Tarik ulur kepentingan pun mewarnai transisi demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan sebuah harapan yang didambakan rakyat banyak yang dipercaya bisa mensejahterakannya. Seiring perjalanan transisi ternyata agenda-agenda perubahan reformasi dihadapkan kepada sebuah problematika, sebuah harapan yang menggebu-gebu diawal reformasi mulai tenggelam dengan hadirnya sesuatu yang mengerogotinya. Di tengah polemik tersebut, di tingkat nasional muncul kekuatan-kekuatan koalisi yang mencoba mempertahankan kan penguasa yang memerintah dengan membentuk blok kekuatan kuat di eksekutif maupun legislatif. Begitu juga dengan semangat reformasi

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Teologi Cipanas – Jawa Barat

meumculkan partai-partai baik dengan simbol agama maupun nasionalis dan juga gerakan keagamaan secara khusus Islam.

Kejatuhan Soeharto tidak muncul dengan seketika saja, melainkan ada riak-riak yang telah mengikutinya. Pada tahun 1997 krisis moneter menjadi pelatuk untuk riak-riak ini menjadi gelombang besar untuk menumbangkan Soeharto dari tampuk kekuasaannya selama 32 tahun. Pemikiran-pemikiran konseptual yang mencoba menerangkan jatuhnya Soeharto dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dari tahun 1970an sampai dengan 1998 yang paling nampak menganalisisnya adalah Edward Aspinal dan Anders Uhlin, keduanya melihat fenomena-fenomena yang mencoba alasan Soeharto turun. Secara garis besar dapat ditarik empat inti utama dalam pemikiran keduanya, 1). Pembangkangan elit yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok seperti petisi 50, YKPK dan Forum Demokrasi. 2). Timbulnya proto-proto oposisi seperti Lembaga swadaya Masyarakat.3). Aktivistis Mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam liberal populis, populer politik dan Islamis. 4). Yang terakhir mulai adanya semi oposisi yang dimainkan oleh PDI di bawah Megawati.

Puncak dari perjuangan para penentang Soeharto ini terjadi pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari tampuk Presiden Republik Indonesia dan secara konstitusional posisinya digantikan oleh wakil Presiden BJ Habibie. Euforia kemenangan dirasakan oleh reformis Indonesia menuju babak baru demokrasi bangsa yang menjunjung hak kebebasan berpendapat dan keadilan. Pasca jatuhnya Soeharto bermunculanlah partai-partai politik seperti cendawan setelah hujan. Pada pemilu tahun 1999, partai-partai bertarung lagi tanpa intimidasi dari penguasa. Dalam pemilu tahun ini jumlah peserta pemilu sangat besar tercatat ada 48 partai yang ikut pemilu tahun 1999. Bukan hanya dalam bidang politik termasuk juga gerakan keagamaan khusus Islam. Bagaimana pandangan umat Islam mengenai relasi Islam dengan politik.

Dalam pengertian Barat, yakni menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang sempurna (*syamil*) dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Aliran Islam ini memiliki keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat sistem politik tersendiri yang berbeda dengan demokrasi Barat, dari pemahaman keberagaman tersebut, aliran Islam ini memperjuangkan formalisme agama Islam menjadi dasar dalam bernegara. Kedua, Islam liberal, aliran ini berpendangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang

tidak memiliki seperangkat konsep kenegaraan, Islam ditempatkan sebatas agama yang hanya mengatur aspek spiritual setiap penganutnya, aliran ini menyakini bahwa Islam tidak boleh ikut campur tangan mengurus masalah kenegaraan. Aliran ini menolak formalisme Islam ke dalam kehidupan kenegaraan. Ketiga, Islam substansi aliran yang menolak pandangan Islam agama serba lengkap, juga menolak Islam tidak memiliki nilai etik politik kenegaraan, aliran terkahir ini menjadi sintesis dari kedua aliran sebelumnya, mereka yang menganut aliran ketiga ini memiliki pandangan bahwa Islam menyediakan pandangan-pandangan etis bagi pengaturan masyarakat dan negara tetapi yang menarik aliran ini menolak formalisme Islam, cukup nilai-nilai substansi Islam tentang keadilan, kesejahteraan dan demokrasi menjadi prioritas utama dalam bernegara.

Reformasi atau pasca kekuasaan Soeharto telah memberikan kesempatan selebar-lebarnya setiap keyakinan serta ideologi politik untuk berlomba-lomba mengisi ruang-ruang publik, selanjutnya di konsestasikan secara legal dan damai melalui pemilu. Tentunya terjadi pergulatan ideologis atau teologis tidak hanya antara kutub agamais dengan nasionalis, bahkan juga sesama kalangan Islam, saling mengklaim penafsirannya paling sesuai dengan ajaran Islam. Tentu pergulatan ini menjadi fenomena yang menarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini melihat dinamisasi Islam politik dan gerakan keagamaan lainnya pasca Soeharto. Apakah bertahan untuk memperjuangkan apirasinya politik bersifat formalis atau mengalami pergeseran nilai dari ideologis ke Islam substansi dengan mengakomodasi beberapa aspirasi umat Islam.

Islam Pada Masa Orde Baru

Sebelumnya, bahwa masa Orde Lama Masyumi dan NU menjadi dua partai terdepan yang mempejuangkan formalisme syariah dengan menghendaki dasar negara berdasarkan Islam. Dan semenjak sebelumpun berdiri Republik Indonesia, di dalam tubuh umat Islam terdapat perdebatan apakah syariah Islam harus menjadi dasar negara atau tidak, apakah Negara Indonesia yang menyoritas penduduknya muslim akan menjadi negara Islam atau negara sekuler. Debat itu berkulminasi pada penghapusan tujuh kata dalam Pancasila, sila pertama “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Muslim demokrat seperti Muhammad Roem dari Masyumi melihat bahwa penghapusan tujuh kata itu tidak mengkhianati aspirasi Islam. Roem juga menilai Pancasila tidak

bertabrakan dengan ajaran Islam. Ia juga memahami bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran dan Hadis yang meniscaya sebuah negara Islam. Sedangkan Mohammad Natsir salah satu tokoh Masyumi menegaskan Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu bersifat relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan Islam yang mempunyai hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui wahyu, yang memiliki ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia. Sikap kritis Natsir terhadap ideologi Pancasila dalam sidang-sidang Konstituante menempatkannya sosoknya sebagai salah satu tokoh penting kalangan Islam formalis yang memperjuangkan dasar negara Islam di Indonesia. Keberadaan M. Natsir dan Masyumi masa Orde Lama telah membawa nuansa baru bagi arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam mengartikulasi kepentingan agama, politik, ekonomi, dan budayanya. Kisah penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta ini mempengaruhi hubungan Islam dan negara. Hubungan keduanya berlangsung fluktuatif, pasang surut, penuh kehati-hatian, cinta dan benci. Karenanya pertarungan tajam antara kubu Islam dan nasionalis (Pancasila) di Konstituante tidak memperoleh titik temu, kedua pihak mengalami jalan buntu dalam mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Setiap kali voting dilakukan antara pihak yang menginginkan Islam sebagai dasar antara pihak yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, suara mayoritas yang diperlukan untuk mencapai konsensus politik tidak tercapai. Bahkan hal tersebut terjadi berlarut-larut, ditambah kemudian dengan banyaknya anggota Konstituante yang tidak bersedia lagi menghadiri rapat. Agar dapat keluar dari persoalan politik yang sangat pelik, atas pertimbangan stabilitas politik serta keamanan nasional, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan lembaga Konstituante dan menyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Bagaimana dengan kaum Islam pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru berkuasa kalangan Islam politik selain mengalami marginalisasi peran politik, juga menghadapi represivitas kekerasan oleh negara, untuk memahami relasi umat Islam dengan Orde Baru, dalam studinya Aay Muhammad Furkon membagi periodeisasi hubungan pemerintah dengan umat Islam.

Pertama, periode 1968-1990 adalah masa ketertindasan, hal ini bermula dari ditolaknya rehabilitasi Masyumi, kemudian diikuti dengan kecurigaan yang tinggi terhadap umat Islam. Karena itu dalam periode ini, berbagai peristiwa terjadi yang menjadikan umat Islam sebagai

sasaran kekerasan negara. Kasus pertama, tragedi berdarah Tanjung Priok. Kasus kedua, pelarangan jilbab, sekitar tahun 1980, semangat pemakaian jilbab yang dilakukan siswi-siswi di beberapa sekolah menengah makin tumbuh, kesadaran memakai kain penutup kepala ini dipengaruhi oleh revolusi Islam Iran 1979, di mana berita-berita revolusi menjadi headline media-media nasional, photo-photo kerumunan demonstran yang menggunakan jilbab, sebagai simbol perlawanan terhadap budaya barat yang hedonis menjadi inspirasi para remaja Islam di Indonesia. Tetapi keinginan para remaja Islam tidak berbanding lurus dengan keputusan pemerintah Orde Baru yang melarang pemakaian jilbab di lingkungan sekolah-sekolah negeri, karena jilbab dianggap bukan standar seragam yang telah diputuskan. Kasus ketiga, tragedi berdarah Lampung, peristiwa itu dalam versi pemerintah dikenal dengan Gerakan pengacau keamanan (GPK) Warsidi, peristiwa berdarah 6 Februari 1989 berawal terjadinya disharmoni hubungan komunitas Cihideung sebagai jemaah Warsidi dengan pihak Koramil way Jepara, upaya damai dilakukan oleh kedua belah pihak, namun bentrokan fisik dari keduanya tidak dapat dihindari, aparat keamanan dengan senjata lengkap, memporakporandakan perkampungan jemaah Warsidi hingga banyak anak-anak dan ibu-ibu yang meninggal. Dalam penelitian kasus ini, Al-Chaidar mengatakannya ada keterlibatan para intelejen dalam merekayasa kasus ini, konflik ini dilakukan sebagai konspirasi untuk membuat pencitraan tumbuhnya Islam radikal, dengan harapan mampu mengembosi suara partai Islam dalam setiap pemilu. Jika dilihat kondisi di atas hampir bisa dipastikan semua ruang gerak Islam politik (formalis) tertutup sudah, belum lagi kebijakan pemerintah untuk memaksakan fusi partai-partai Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

Kedua, periode era 1990-an kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam sedikit demi sedikit berubah, membuka komunikasi dengan kalangan Islam bahkan melalui Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, presiden Soeharto membangun ratusan mesjid dan mensponsori pengiriman Dai ke daerah terpencil. Kemudian di tahun 1991, Soeharto meresmikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta pada tahun yang sama membuka festival Istiqlal, dalam festival itu serangkaian budaya Islam nasional dan internasional dipertonton sebagai simbol penghargaan terhadap budaya Islam. Tidak hanya itu awal dekade 1990-an pemerintahan orde baru membolehkan para siswa di sekolah umum untuk menggunakan jilbab, bahkan

Soeharto kemudian menempuh langkah politik cukup mengagetkan dengan merestui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebagai gerbong yang menghimpun para intelektual muslim Indonesia.

Merespon kebijakan orde baru yang represif terhadap Islam periode pertama, kalangan Islam politik mengalami polarisasi menyikapinya, ada yang melakukan konfrontasi terhadap orde baru dan sementara yang lain, mengambil langkah adaptasi serta responsif dengan menafsirkan teologi Islam selaras dengan kebijakan modernisasi orde baru.

Kalangan responsif ini dimotori Nurcholis Madjid melalui proyek pembaharuan Islamnya, ia menginginkan wajah Islam formalis ketika itu tidak dikehendaki orde baru menjadi Islam yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dunia yang modern, sehingga apresiasi yang diberikan Islam adalah apresiasi ilmiah bukan ideologis formalis. Menurutnya, apresiasi ideologis sangat berbahaya, karena bersifat tertutup, berbeda dengan apresiasi modern yang terbuka. Bahkan lebih jauh, Nurcholis berpandangan bahwa “ negara Islam “ yang selama ini dicita-citakan Islam formalis, merupakan sebuah gejala apolegetis umat Islam yang terbelakang terhadap kemajuan dunia barat. Konsep bernegara menurutnya, harus dapat dibedakan di mana wilayah yang menjadi proporsi negara dan mana yang merupakan wilayah agama, bagi Nurcholis negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual guna mengurus, mengintervensi dan mengawasi sikap batin warga negaranya, karena itu tidak mungkin Indonesia memilih Islam sebagai bentuk fondasi konstitusi bernegara. Agama Islam yang dipahami oleh Nurcholis Madjid¹⁾, ditempatkan pada tingkat yang lebih abstrak sebagai nilai-nilai etis yang berfungsi memberikan arah serta orientasi kepada umatnya, Islam tidak dipahami sebagai agama bersifat legal-formalistik, yang melahirkan formalisme susunan dan struktur politik kenegaraan. Islam harus melahirkan jiwa demokratis yang menghargai prinsip-prinsip pluralisme yang selaras dengan arus modernisasi, Nurcholis menawarkan solusi dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi yaitu menerima modernitas sebagai sunatullah (keniscayaan) dengan mengakarkan diri pada tradisi Islam, memelihara yang lama, yang baik dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Pembaharuan Islam yang digelorkan Nurcholis Madjid, yang lebih banyak mengutamakan pendekatan inklusivitas dalam masyarakat Indonesia yang mejemuk ternyata dapat melestarikan komunikasi dengan golongan lain khususnya pemerintah.

Jadi kekuasaan orde Baru mampu bertahan selama tiga dekade, tahun 1998 orde baru tumbang oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, salah satu kebijakan pemerintah pasca Soeharto dalam melakukan penataan perangkat keras yaitu dengan menata kembali sistem kepartaian di Indonesia pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie membebaskan pendirian partai politik selain tiga partai politik warisan Orde baru.

Islam Pasca Orde Baru

Bagaimana respon umat Islam terhadap pasca orde baru. Mark Woodward misalnya, mengelompokkan respon Islam atas perubahan pasca Orde Baru ke dalam lima kelompok. Pengelompokan Woodward ini tampaknya melihat dari sudut doktrin dan akar-akar sosial di dalam masyarakat Islam Indonesia yang lama maupun yang baru. Pertama, *Indigenized Islam*. *Indigenized Islam* adalah sebuah ekspresi Islam yang bersifat lokal, secara formal mereka mengaku beragama Islam tetapi biasanya mereka lebih mengikuti aturan-aturan ritual lokalitas ketimbang ortodoksi Islam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai Islam abangan untuk konteks Jawa. Dalam hubungan politik dan agama, mereka mengikuti cara berpikir sekuler dan enggan membawa masalah agama ke ranah negara dan sebaliknya.

Kedua, kelompok tradisional Nahdatul Ulama (NU). NU adalah penganut aliran sunni terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki ekspresinya sendiri, karena di samping ia memiliki kekhasan yang tidak dimiliki kelompok lain seperti yang kuat di pesantren dan di pedesaan, hubungan guru dan murid yang khas, mereka juga dicirikan oleh akomodasi yang kuat atas ekspresi Islam lokal sejauh tidak bertentangan dengan Islam sebagai keyakinan. Ia tampaknya tidak berusaha untuk memaksakan “Arabisme” ke dalam kehidupan keislaman sehari-hari. Ketiga, Islam modernis. Mereka terutama berbasis pada Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua setelah Nahdatul Ulama (NU). Ia berbasis pada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ia memperkenalkan ide-ide modernisasi dalam pengertian klasik. Ia misalnya dalam arus utamanya menolak ekspresi lokal dan lebih mengukuhkan ekspresi puritarisme yang lebih menonjolkan “keAraban”.

Keempat, Islamisme atau Islamis. Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme tetapi juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran

kalau Jihad dan penerapan syariah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini. Kelompok ini juga tidak segan-segan membentuk barisan Islam paramiliter untuk melawan siapa saja yang diidentifikasi sebagai musuh Islam yang mereka defenisikan. Kelima, neo-modernisme Islam. Ia lebih dicirikan dengan gerakan intelektual dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. Ia berasal dari berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung berbagai NGO dan institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam dan pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka melakukan pencarian tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam berdasarkan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat dan metode-metode baru seperti hermeneutika.

Runtuhnya Orde Baru, yaitu modernis, tradisional, neomodernis dan Islamis. Secara umum, Riddel sepaham dari defenisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu ketegori dari Woodward yaitu *Indigenized* Islam. Bagi Riddel, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode pertama pasca pemilu pertama runtuhnya Orde Baru yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain, kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang dengan Israel, negara Indoensia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, presiden prempuan dan partai politik baru.

Meskipun berbeda kategori dengan kedua pendapat di atas, bahwa sejak jatuhnya orde baru di susul dengan era reformasi oleh beberapa pengamat dipandang sebagai situasi yang kondusif bagi munculnya partai-partai politik Islam dan gerakan Islam di Indonesia. Penulis mencoba melihat bagaimana kategori-kategori ini bermain dalam bidang politik maupun dalam gerakan-gerakan bernunasa Islam. Bagaimana perkembangan Islam politik di era pasca Orde Baru dan bagaimana relasi (formalis atau substansi) Islam politik dengan negara.

Partai-partai Islam Pasca Orde Baru

Ledakan partisipasi pendirian partai Islam ini bersifat sesaat yang hanya terjadi di pemilu pertama era reformasi di tahun 1999, ada 11 partai Islam dari 48 partai yang ada dan untuk pemilu berikutnya tahun 2004, 2009, dan 2014 jumlah partai Islam mengalami penurunan yang signifikan, tercatat hanya lima partai Islam yang masih tetap bertahan di antaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), penulis menguraikan

nya. Partai Amanat Nasional merupakan partai berbasis massa Islam yang didirikan oleh Amien Rais (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, yang dihadiri sekitar 15 ribu orang, partai berlogo matahari ini menetapkan basis massanya dari kalangan Islam modernis (Muhamadiyah). Meskipun berbasiskan umat Islam perkotaan, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajemukan, pluralisme dan keadilan sosial. Partai ini beranggotakan warga negara Indoensia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik pemikiran, etnis dan agama. Menurut Amien Rais, penggunaan asas Pancasila sebagai ideologi PAN, dilandasi oleh tiga alasan. Pertama, karena alasan teologi, dalam Islam (Al-Quran) menurutnya tidak ada satu ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan mendirikan negara Islam. Kedua, alasan bersifat rasional yakni tidak ada catatan dalam sejarah nasional yang menceritakan kemenangan partai Islam semenjak berdirinya republik Indonesia, dalam arti memperoleh suara mayoritas ketika kontestasi pemilu, baik pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru. Ketiga, untuk mengayomi serta melindungi kalangan minoritas yang senantiasa dihinggapi ketakutan ketika umat Islam mendirikan partai Islam¹⁵⁾. Bagi Amien Rais konsep negara Islam harus ditolak karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadist, lebih penting menurutnya negara harus menjalankan etika Islam yang menegakkan keadilan sosial jauh dari eksploitasi satu golongan atas golongan lain, apakah artinya negara Islam bersifat formalis tetapi tidak mampu menghadirkan ruh Islam dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi ideologi PAN semakin ke tengah dan tidak lagi bersifat ideologis (Islam), terlebih dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa dan partai ini merupakan bagian dari pemerintahan yang nasionalis.

Kelahiran Partai Keadilan (PK) tanggal 20 Juli 1998 dan dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta, menandakan tampilnya para aktivis dakwah ini ke publik dengan berlambangkan dua bulan sabit berwarna emas dan garis lurus diantara kedua bulan sabit itu. PK meneguhkan jati dirinya sebagai partai yang berasaskan Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bagi PK pandangan moderat merupakan sikap obyektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyeru

kemudahan, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan, dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bai PK pandangan moderat merupakan sikap obyektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyerukan kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam.

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan di DPR RI hanya mendapat tujuh kursi anggota legislatif, tentu hasil ini tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta pemilu di tahun 2004. Kecuali bila berganti nama dan lambang partai, akhirnya pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjutan perjuangan PK. PKS berasas Islam dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokrasi serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Meski berasas Islam, PKS dalam visi, misi maupun di anggaran dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam, walupun bagi PKS relasi Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, mendirikan negara Islam adalah persoalan lain. Menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan yang lebih utama menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam hadir dalam kaidah publik, negara yang dikehendaki PKS adalah negara berkeadilan dan berkesejahteraan.

Partai Bulan Bintang dideklarasikan tanggal 17 Juni 1998, meski pun sebenarnya embrio pembentukan partai ini bisa dilacak sejak tahun 1989, ketika beberapa ormas Islam membentuk BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam), sebuah lembaga yang menjadi forum bertemunya tokoh-tokoh Islam dalam membahas berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. Walupun demikian bahwa PBB dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada awal pasca Orde Baru ketika membahas amandemen UUD 1945 pada sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat ingin memperjuangkan kembali Piagam Jakarta masuk ke dalam UUD 1945 walaupun PPP tidak menginginkan terbentuknya negara Islam yang diinginkan adalah tegaknya syariah. Pernyataan

yang sama juga muncul dari fraksi PBB sebagaimana disampaikan juru bicaranya Hamdan Zoelva. Fraksi setuju dengan menambahkan tujuh kata dari Piagam Jakarta untuk mengubah pasal 29 UUD 1945 dengan alasan pokoknya antara lain adalah konsistensi amanah dari pendahulu negeri ini. Fraksi PBB tidak keberatan kalau pengambilan keputusan soal ini dilakukan secara voting. Jadi fase ini memperlihatkan pada awal reformasi bagaimana politik Islam selalu gencar untuk mewujudkan ideologi dan gerakan politiknya. Menyongsong pemilu 2014, menurut MS Kaban, apabila PBB ditakdirkan berkuasa partai ini bertekad akan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang ditopang kepastian hukum guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah negara kuat tercermin dari kemandirian di bidang ekonomi dan kekuatan militer yang tangguh sehingga Indonesia disegani serta bermartabat di pentas internasional. Saat ini menurut Kaban, Indonesia sangat bergantung pada impor, bahkan hampir semua kebutuhan masyarakat termasuk komoditi pangan semuanya merupakan produk dari negara lain, pada hal Indonesia memiliki lahan luas yang bisa dioptimalkan untuk produk dan diversifikasi pangan. Sedangkan di sektor keuangan Indonesia disetir asing sehingga kurs rupiah selalu turun naik yang membuat sektor riil tidak optimal berproduksi, terlebih rezim saat ini, terlalu gampang membiarkan ekspor bahan mentah, seharusnya diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah.

Partai persatuan pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, PPP merupakan hasil gabungan dari empat partai politik Islam warisan pemerintahan Orde lama, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Indonesia (Pertti) dan Partai Muslimin Indonesia (Permusi). Awalnya PPP menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintahan Orde Baru, PPP meninggalkan asas Islamnya dan menggunakan asas Pancasila serta mengganti gambar Ka'bah dengan bintang segi lima, salah satu gambar yang terdapat dalam burung garuda.

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kab'ah melalui Muktamar IV di akhir tahun 1998. Kemudian pada Muktamar V tahun 2003 disebutkan dalam anggaran dasar (AD), PPP bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah negara kesatuan Indonesia (NKRI)

yang di bawah ridho Allah. Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas partai di pemilu 2014, Ketua Umum PPP, mengenalkan tagline PPP sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Tagline ini ditujukan kepada partai-partai yang tidak bisa bertahan di pemilu 1999, 2004, dan 2009, diharapkan pulang kembali ke rumah besar Islam, PPP menawarkan diri sebagai rumah nyaman bagi umat Islam dari beragam mazhab dan aliran. Rumah besar umat Islam tidak hanya untuk pemeluk agama Islam saja tetapi juga untuk umat agama lain, PPP ingin mempersembahkan rumah besar ini untuk Indonesia.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2014, PPP berharap memperoleh suara di atas 15 %, meskipun di beberapa survei terakhir dari beberapa lembaga survei, tingkat elektabilitas PPP di bawah 10 % tetapi PPP optimis akan mampu meraih target tersebut, salah satu alasannya menurut Romahurmuziy, biasanya suara partai Islam di pemilu selalu tinggi dari perkiraan hasil survei. Ini karena sebagian pemilih menunggu fatwa dari panutannya (Ulama atau Kyiai), fatwa tersebut biasanya akan keluar di akhir putaran masa kampanye pemilu legislatif. Ternyata perkiraan lembaga survei terbukti, suara PPP di bawah angka 10 %, meskipun mengalami kenaikan dari 5 % (2009) menjadi 6 % di pemilu 2014 tetap saja perolehan suara ini jauh di bawah target yang ditetapkan.

Gerakan Islam Pasca Orde Baru

Pasca jatuhnya Orde Baru lalu kemudian disusul dengan terciptanya era disebut dengan era reformasi oleh beberapa pengamat dipandang sebagai situasi yang kondusif bagi kemunculan berbagai gerakan Islam di Indonesia. Gerakan oleh Tolkhah di namakan Gerakan radikalisme Keagamaan, karena aksi-aksi yang mereka lakukan ditengarai memiliki ciri radikalitas yang melekat seperti kepemilikan kepemimpinan dan perorganisasian yang karismatik, kepedulian purifikasi keyakinan dan perilaku, pengajaran konsep kejihaan (*martyrdom*) serta terutama karena adanya pandangan organisasi yang ingin melakukan transformasi pandangan hidup bangsa, dan sebagian kegiatan yang dilakukan terkesan keras tanpa kompromi, main hakim sendiri dan bahkan merusak.

Bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh kelompok ini memang telah menjadi wujud perilaku keagamaan yang baru di Indonesia dan menjadi sorotan masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan Jamhari dan Jajang tak dapat dielakkan bahwa kehadiran mereka telah memberi citra negatif terhadap Islam Indonesia. Namun terlepas dari

sekian banyak sebutan yang dikenakan kepada mereka harus pula disadari fenomena tersebut sesungguhnya memiliki akar historis keagamaan yang panjang.

Dalam konteks ini, Esposito memaparkan: saat ini Islam terus menunjukkan dinamika dan keragaman ekspresinya. Tema dominan dalam Islam yang lebih nyata pada kehidupan kaum muslim dapat disaksikan di sebagian besar dunia Islam sejak dekade 1970an, entah itu berupa pakaian kaum perempuan di jalan-jalan Kairo, Istanbul, Kuala Lumpur atau dalam kehidupan politik kaum muslim mulai dari Tunisia sampai Mindanao. Islam kembali ditegaskan secara lebih kuat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik masyarakat Muslim dengan cara yang ketat dan terkadang dramatis yang seringkali disebut sebagai kebangkitan Islam, revivalisme Islam atau fundamentalisme Islam.

Jhon L Esposito memang lebih senang menggunakan istilah revivalisme atau aktivisme Islam karena istilah fundamentalisme terbebani oleh asumsi-asumsi Kristiani dan palabelan oleh dunia barat serta mengandung ancaman yang bersifat monolitik. Sebab menurut Esposito dua istilah yang dia usulkan, *Islamic Revivalisme* dan *Islamic activism*, lebih ringan bebannya selain juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi reformasi dan aktivisme sosial dalam Islam. Apa yang diusulkan oleh Esposito di atas lebih merupakan sebuah upaya untuk melihat semantik fundamentalisme Islam yang memang seringkali dipahami secara salah kaprah oleh kalangan Barat. Namun “Fundamentalisme Islam” bukan hanya dikritik oleh kalangan Ilmuan Barat. Bahkan Ilmuan dari Asia sendiri banyak yang menyoroti Fundamentalisme Islam dengan nada sinis. Fazlur Rahman¹ misalnya menyebutkan fundamentalisme sebagai orang yang dangkal dan “*superfisial*”, anti intelektual dan pemikirannya “tidak bersumber kepada Al-Quran dan budaya tradisional Islam”. Dalam pada itu Nurcholis Madjid, seorang tokoh “neo modernis” yang lain menggunakan istilah “fundamentalisme” dalam konteks agama Kristen di Amerika serikat sebagai agama pengganti “yang lebih rendah” dibandingkan dengan agama-agama yang sudah ada.

Namun dalam pandangan gerakan Islam ini bahwa sebagian perkembangan budaya bangsa Indonesia dewasa ini dinilai tidak lagi mencerminkan sebagai budaya yang religius. Pandangan ini telah mendorong bangkitnya kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikenal dengan istilah “*nahi munkar*” dengan cara menghilangkan pusat-pusat kegiatan maksiat tersebut. Misalnya,

gerakan-gerakan yang ingin menerapkan syariah dan dianggap bertentangan dengan syariah, Komite Indonesia untuk solidaritas (KISDI), Majelis Mujahidin Indonesia (IMM), Hizbut Tharir (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad. Ketiga, faktor solidaritas dan pembelaan. Sebagai gerakan Islam muncul sebagai solidaritas membela kelompok Islam, yang dinilai diperlakukan tidak manusiawi oleh kelompok lainnya. Dalam pandangan mereka, pembelaan terpaksa dilakukan karena pemerintah tidak melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut. Faktor inilah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya gerakan Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad di berbagai daerah. Menurut Mietzner ada tiga tipe kelompok radikal di Indonesia, sebagai sel teroris, “*anti-vice*” militan dan para militer yang sering terlibat dalam konflik horizontal. Misalnya, teroris, sesudah Soeharto lengser, Abu Bakar Ba’asyir yang tinggal di Malaysia selama 17 tahun kembali ke Indonesia. Pada tahun 1972 bersama dengan Abdullah Sungkar membangun Al-Mukmin, pesantren di Ngruki, Jawa Tengah. Ba’asyir juga pimpinan Jemaah Islamiyah (JI) merupakan payung organisasi untuk sel teroris di Indonesia dan Asia Tenggara.

Begitu juga dengan kaum militan yang menfokuskan gerakannya untuk memperjuangkan moral Islam dengan menggunakan kekerasan yakni FPI. Organisasi ini didirikan pada tahun 1988 di Jakarta Selatan. Ketiga, adalah paramiliter. Kelompok ini lebih melindungi kelompok muslim pada daerah konflik, khususnya konflik di Poso dan Maluku, yakni Laskar Jihad. Pada Oktober 2002, Forum Komunikasi Ahlusunah wal Jamaah merupakan payung bagi Laskar Jihad, memutuskan untuk membubarkannya. Keempat, teologis doktriner. Gerakan Islam kontemporer yang cenderung radikal, tumbuh subur sebagai respon reaktif terhadap dinamika perkembangan pemikiran teologis dan praktek peribadatan atau pengalaman ajaran yang dinilai dipenuhi oleh kebid’ahan, baik bi’dah akidah, budi pekerti, ibadah, maupun bid’ah muamalah. Fenomena praktik bid’ah yang secara historis kultural, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filosofis, peradaban religius agama-agama lain yang berkembang sebelum masuknya Islam di Indonesia, juga budaya-budaya lokal, merupakan faktor penghambat kemajuan Islam. Karena ini gerakan ini perlu dilakukan upaya purifikasi ajaran secara serius melalui berbagai pendekatan dakwah.

Kesimpulan

Di era reformasi pasca orde baru, terutama setelah kebebasan politik, Islam mengalami kebangkitan. Ada perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru, yang mulai mengakomodasi aspirasi Islam. Aspirasi Islam lebih nampak di pentas politik nasional di bandingkan dengan periode Orde Baru yang belum sepenuhnya memberikan saluran politiknya.

Karena itu, memotret perkembangan politik Islam Indonesia pasca orde baru menemukan sesuatu yang menarik. Sejak tahun 1990an situasi politik berubah menjadi menarik dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Soeharto awalnya dipahami oleh kalangan Islam politik sebagai “pintu” bahkan “patron” dalam upaya memperbesar akomodasi dan representasi politik Islam, tiba-tiba diposisikan sebagai musuh bersama publik, bahkan sebagian besar kalangan Islam. Sementara BJ Habibie, penggantinya belum sepenuhnya menjadi penguasa baru, yang secara tiba-tiba dipaksakan sebagai “pintu” umat Islam.

Kejatuhan rezim Orde Baru membangkitkan kesadaran politik umat Islam untuk menyongsong periode berikutnya yakni periode kebangkitan. Ada yang menginginkan kembalinya Piagam Jakarta untuk dimasukkan ke dalam UUD dan ada juga yang memahami Islam bukan dalam bentuk formal kenegaraan. Tetapi mereka memahami nilai-nilai Islam dalam perilaku bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kebangkitan Islam pada pasca Orde Baru ditandai dengan dengan mendirikan partai-partai yang awalnya sebelas partai tetapi dalam perkembangannya menjadi lima partai. Menyusutnya partai-partai Islam merupakan fenomena menarik di tengah masyarakat mayoritas Muslim. Ini lebih disebabkan oleh konflik di dalam partai itu sendiri dan banyaknya pimpinan partai yang terlibat dalam kasus korupsi. Dan juga partai-partai Islam masuk ke dalam pemerintahan dan menandakan wajah Islam politik yang akomodatif dan pragmatis.

Di samping partai-partai Islam, juga munculnya gerakan-gerakan Islam dalam bentuk ormas yang dalam realitanya ingin memperjuangkan syariah dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Walaupun keberadaan ormas ini menimbulkan kecemasan di satu pihak yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan di pihak lain, keberadaan ormas ini mendapat dukungan dari masyarakat tertentu dengan tujuan masing-masing. Tetapi keberadaan ormas keagamaan ini tidaklah mendapat respon yang positif dari masyarakat karena mereka lebih memiliki motif politik dengan memakai baju keagamaan. Di lain pihak keberadaan ormas Islam

terbesar seperti NU dan Muhammadiyah lebih menerima keberadaan negara seperti saat ini berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan gerakan dakwahnya dan pendidikannya lebih mengakar di Indonesia. Itulah yang memungkinkan ormas-ormas radikal ini tidak bisa bergerak secara leluasa untuk mewujudkan tujuan politik yakni negara Islam.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- , *Islam dan Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Iman dan Realitas Sosial*, Jakarta: Insiasi Press, 2004.
- , *HTI dan PKS menuai kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*, Yogyakarta : JKSG, 2013.
- Abidin, Amir, Zainal, *Peta Islam Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta : LP3ES, 2003.
- Al-Hamdi, Ridho, *Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Arianto, S, *Piagam Jakarta dan Cita-cita Negara Islam* (Kurniawan Zain dan Syarifuddin HA), Syariah Islam, Yes, Politik Islam, No, Jakarta : Paramadina, 2002.
- Arya Bima, *Re-Kontekstualisasi Partai-Partai Islam dalam Bima Arya: Anti Partai*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Aspinal Edward, *Opposing Soeharto: Compromise Resistance and Regime Change in Indonesia*, California : Stanford University Press, 2005.
- Bayat, Asef, *Making Islam Democratic, California*: Stanford University Press, 2007.
- Damanik Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung : Teraju, 2002.
- Esposito L. John, *The Straight Path* (diterjemahkan Arif Muftuhin), Jakarta : Paramadina, 1988.
- Furkon Muhamad Aay, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*, Jakarta: Taraju, 2004.
- Gafar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Gaus AF, Ahmad, *Api Islam Nurcholis Madjid : Jalan Hidup seorang Visioner*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2010.
- Jajang Jahroni, Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Madjid, Nurcholis, *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mietzer, Marcus, *Military Politics, Islam and the State in Indonesia*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Mubarak Zaki, M, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2008.
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Novianto, Kholid dan Al-Chaidar, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djilil, Nurmahmudi dan Yusril Izha Mahendra*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Qadir, Zuly, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation*, Minneapolis : Biblio Theca Islamica, 1979.
- Sidahmed, Salem Anandel and Anoushiravan Ehteshami (ed), *Islamic Fundamentalism, United State America* : Westview Press, 1996.
- Tholkah, Imam and Choirul Fuad, *Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi*, Jakarta : Badan Litbang agama dan Diklat keagamaan, DEPAG RI, 2007.
- Uhlin, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Gelombang Demokratisasi Ketiga di Indonesia*, Bandung : Mizan Pustaka, 1998.
- Urbaningrum, Anas, *Islam – Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*, Jakarta : Penerbit Republika, 2004.

Jurnal dan Surat Kabar

- Harian Kompas Partai Persatuan Pembangunan: Suryadarma Ali, Rumah Besar Umat Islam yang Inklusif, (*tanggal 24 Januari 2014*).
- Harian Kompas, Partai Bulan Bintang, MS Kaban: Kita punya modal jadi negara kuat. (*tanggal 28 Januari 2014*).
- Harian Kompas, PPP, Rumah yang masih Sepi (*tanggal 24 Januari 2014*).
- Imam, Tholkah, *Krisis Sosial dan Kebangkitan Gerakan Radikalisme Keagamaan Era Reformasi di Indonesia*, Dialog, No 54 Tahun XXV, 2002.,
- Jamawaku, Anto, “*Perpecahan Partai Politik, Pembrantasan Korupsi dan berbagai masalah Politik lainnya*” dalam *Jurnal Analisis*

- CSIS: Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Vol.34,No.2, Jakarta, 2005.
- Riddel G, Peter, “*The Diverse Voices of Political Islam in Post Soeharto, Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 13, No. 1. 2002.
- Sulistiyanto, Audy, Mujahid Dakwah yang tidak kenal lelah dalam Edisi Khusus 100 Tahun, Mohammad Natsir, *Majalah Sabilli*, 2002.
- Woodward, Mark, “*Indonesia, Islam and The Prospect of Democracy*”, SAIS Review, Vol.XXI,No.2,2001.